



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* OLEH PEMERINTAH DAERAH

Ikhlas Wau
Ratmono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze factors affecting availability and accessibility of Government's internet financial reporting (IFR). Factors which are going to be tested are political competition, local government's size, local government's financial independency, income per capita and audit opinion. This study examines 112 local government on Java Island based on availability and accessibility from its website. This study tested by two methods, ordinal regression method for the availability and multiple regression method for the accessibility.

The study using ordinal regression found that income per capita and audit opinion has positive relationship to the availability of financial information on the Government's website. The study using multiple regression found that local government's financial independency has positive relationship to the accessibility of financial information in Government's website.

Keyword :Transparency, Local Government, Local Government Official Website, Financial Disclosure, Financial Information

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsekuensi dari *agency problem* yaitu pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal (Zimmerman, 1977). Pemerintah sebagai Agen mendapat mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugas pemerintahan yaitu memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana dari masyarakat dan sumber-sumber daya yang lain. Sebagai indikator pelayanan publik yang baik, maka pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah kepada masyarakat adalah dengan menyampaikan informasi penggunaan sumber-sumber daya dalam bentuk informasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pemda ditujukan antara lain untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat (KSAP, 2005). Ryan et al. (2002) menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Steccolini (2002) yang menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas dapat efektif apabila informasi yang disajikan relevan dan dapat diakses oleh semua pihak. Undang-undang telah mengamanatkan setiap

¹ Corresponding author

pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, namun laporan keuangan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kendala mengingat jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyajikan dan melakukan diseminasi laporan keuangannya (Pina, et.,al, 2010). Dengan terjangkaunya akses terhadap informasi keuangan pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program pemerintah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* yang disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang murah dan efektif (*cost effective*) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan (Styles dan Tennyson, 2007), namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah belum maksimal. Penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa *website* pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan (Muhammad, 2012). Selain belum maksimalnya pemanfaatan *website* sebagai media pelaporan keuangan pemerintah, terdapat keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan pemerintah dalam mengungkapkan informasi keuangannya. Penelitian yang ada masih terbatas pada sektor privat

Penelitian dari perspektif sektor publik yang dilakukan oleh Laswad, et., al (2005) meneliti faktor *leverage*, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal memiliki pengaruh yang negatif. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) menganalisis faktor-faktor seperti ukuran daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan akuntansi, pendapatan per kapita, tingkat utang dan kondisi keuangan kota terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan laporan keuangan tahunan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota yang lebih besar memiliki kecenderungan melakukan pelaporan keuangan internet. Kota dengan pendapatan per kapita dan tingkat pengungkapan akuntansi yang lebih tinggi cenderung melakukan pelaporan keuangan di internet. Keteraksesan laporan secara positif memiliki hubungan dengan jumlah penduduk, pendapatan per kapita penduduk, tingkat utang dan kondisi keuangan pemerintah kota.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kompetisi politik, ukuran pemda, rasio kemandirian pemda, pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit terhadap ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori *Signalling*

Dari perspektif publik, teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah. Teori *signalling* dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap. Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan

informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Pemda akan berusaha melakukan pelaporan keuangan melalui *website* secara lebih optimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2012).

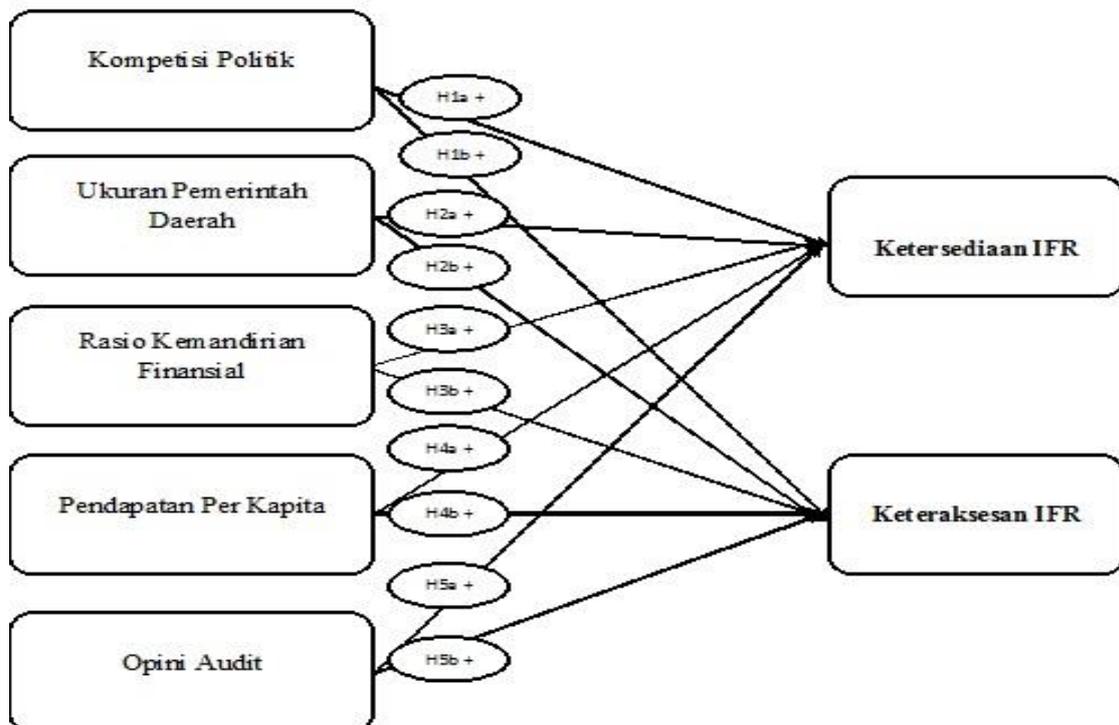
Teori Keagenan

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Banker dan Paxton (1987) mengatakan hubungan antara pimpinan pemerintahan/politikus dengan masyarakat/pemilih dapat disebut sebagai hubungan agensi. Pada pemerintahan di Indonesia, pemda bertindak sebagai *agent* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat selaku *principal*. Masyarakat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemda untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Pemda selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan pemerintahan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat sebagai prinsipal adalah dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2015

Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda

Kepala daerah mempunyai potensi untuk tidak terpilih kembali pada pemilihan berikutnya sehingga pemerintah daerah akan berusaha untuk mengurangi perselisihan dengan masyarakat (Zimmerman, 1997). Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh isu yang berkembang dan pemberitaan-pemberitaan media. Lawan politik pemerintah yang berkuasa akan selalu kritis terhadap kebijakan yang dibuat. Mereka juga akan memantau pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Hal itu mengakibatkan pemda yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih tinggi dengan memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji mereka sebelum pemilu (Baber dalam Laswad dkk., 2005). Internet merupakan media yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi secara instan dan simultan sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan kewajiban pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 a: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda

H1 b: Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda

Secara umum, semakin besar suatu kota maka akan semakin banyak program dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikerjakan dan akan semakin banyak pula sumber daya yang digunakan (Giroux and Shields, 1993; Giroux and McLelland, 2003). Dengan kata lain penggunaan sumber daya yang banyak akan meningkatkan pengawasan oleh masyarakat. Untuk dapat memaksimalkan pengawasan dari masyarakat pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan merupakan salah satu cara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Adanya kebutuhan yang besar dalam pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah maka diharapkan pemerintah dapat mengadopsi berbagai metode untuk pengungkapan tersebut. Internet merupakan media yang efisien dan memuaskan yang dapat digunakan oleh pemerintah yang memiliki ukuran yang besar dalam menyampaikan laporan keuangannya secara sukarela dibandingkan dengan cara tradisional dengan mengkopi laporan keuangan yang banyak, oleh sebab itu biaya yang digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan di internet sangat tergantung dari ukuran suatu pemerintahan (Ettredge et al., 2002; Pirchegger and Wagenhofer, 1999). Begitu juga Akibatnya, manfaat dari pengungkapan melalui internet cenderung akan meningkat dengan ukuran (Debreceeny, dkk 2002; Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad, dkk 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 a: Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda

H2 b: Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda

Pengaruh Rasio Kemandirian Finansial terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda

Pemerintahan yang memiliki manajemen yang baik akan mempunyai kecenderungan untuk mengungkapkan informasi keuangannya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah telah menjalankan amanat rakyat dan meningkatkan peluang untuk memenangkan pemilihan di masa yang akan datang. Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah berhubungan positif dengan pengungkapan karena hal tersebut merupakan sinyal atas manajemen pemerintahan yang baik. Kemandirian daerah yang tinggi dapat ditunjukkan dengan tingginya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan, pemerintahan yang memiliki rasio pendapatan asli daerah yang rendah menunjukkan kinerja pemerintahan yang kurang baik. Hal ini

dapat mengurangi dorongan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat atas informasi keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H3 a: Kemandirian Finansial pemda mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda
H3 b: Kemandirian Finansial pemda mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda

Pengaruh Pendapatan per kapita masyarakat terhadap tingkat ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh Pemda

Daerah dengan masyarakat yang memiliki pendapatan besar akan meningkatkan kebutuhan akan akuntabilitas oleh pemerintah (Ingram, 1983). Daerah dengan masyarakat yang memiliki pendapatan besar akan memiliki tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat dan akan meningkatkan permintaan atas informasi kinerja pemerintah (Styles and Tennyson, 2007). Pendapatan per kapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Hal ini juga dapat digunakan sebagai ukuran dari tingkat produktivitas masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mengadopsi teknologi untuk mendapatkan informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H4 a: Pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda
H4 a: Pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda

Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat Ketersediaan dan Keteraksesan IFR oleh Pemda

Styles and Tennyson (2007) berpendapat bahwa pemda yang mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik, cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya di internet. Bentuk penghargaan yang diterima pemerintah daerah atas keberhasilannya dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK. Opini WTP yang diperoleh pemda diharapkan dapat mendorong pemda untuk mengungkap laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H5 a: Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap ketersediaan IFR oleh Pemda
H5 b: Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap keteraksesan IFR oleh Pemda

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketersediaan dan keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah. Variabel Independen dalam penelitian ini antara lain: kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit. Tingkat ketersediaan IFR didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan dokumen-dokumen laporan keuangan secara online di website pemda dan diukur dengan menggunakan skala ordinal 2=jika terdapat dokumen LKPD secara lengkap di website pemda, 1=jika terdapat salah satu dari komponen LKPD atau dokumen APBD dan 0=jika tidak terdapat informasi keuangan baik LKPD maupun dokumen APBD. Tingkat keteraksesan IFR didefinisikan sebagai tingkat kemudahan pengguna dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di *website* pemda dan diukur dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007).

Tabel 1
Keteraksesan IFR

Skor	Syarat
+1	Jika Website Pemda dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian google dengan mengetik nama pemda
+1	Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat IFR dalam website Pemda
+1	Jika data IFR dapat diunduh dalam format PDF atau HTML
+1	Jika terdapat IFR tahun sebelumnya dalam website pemda
+1	Jika terdapat link data informasi keuangan (LKPD/APBD)
+1	Jika terdapat search engine untuk melakukan pencarian informasi keuangan
+5	Jika terdapat komponen LKPD (Neraca, LRA, LAK dan CALK) dan APBD
+1	Jika terdapat informasi kontak (telepon/fax/email) untuk mendapatkan data informasi keuangan.

Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar. Selain memiliki jumlah penduduk terbesar hampir sebagian besar pengguna internet berada di Pulau Jawa. Hal tersebut merupakan pertimbangan peneliti untuk menjadikan Pulau Jawa sebagai populasi dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji ketersediaan IFR adalah regresi logistik ordinal (PLUM) dan menguji keteraksesan IFR dengan regresi berganda.

Model 1

$$\text{Logit(KETERSEDIAAN)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Polcomp} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 + \beta_5 \text{Opini}$$

Model 2

$$\text{KETERAKSESAN} = \alpha + \beta_1 \text{Polcomp} + \beta_2 \text{Size} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 \text{Income} + \beta_5 \text{Audit Opinion} + \mu_i$$

IFR = Keteraksesan IFR

α = Konstanta

Polcomp = Kompetisi Politik

Size = Ukuran Pemerintah Daerah

Indep = Kemandirian Finansial Pemda

Income = Pendapatan per kapita Masyarakat

Audit Opinion = Variabel dummy jenis opini (kode 1 untuk opini WTP dan 0 untuk opini selain WTP)

μ = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK (IHPS I 2013), data BPS dan pengamatan langsung terhadap website pemda diperoleh sebanyak 112 pemda yang memenuhi kriteria variabel penelitian. Berikut merupakan deskripsi statistik penelitian:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
POLCOMP	112	2	10	5	1.58132
SIZE	112	881.873.125839	35.358.824.156.595	3.807.458.609.676	4.648.200.329.806
INDEP	112	0,033620	2,284740	0,15657891	0,233216213
INCOME	112	6.130.000	275.380.000	25.035.267	41.962.257
OPINI	112	0	1		
KETERSEDIAAN	112	0	2		
KETERAKSESAN	112	0,076920	0,923080	0,33569339	0,173497193

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 3
Statistik Deskriptif Opini

Kategori Opini	Jumlah	Persentase
0	82	73.2
1	30	26.8
Total	112	100.0

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pembahasan Hasil Penelitian

Model I Ketersediaan IFR

Ordinal Logistic Regression (PLUM) digunakan untuk menguji pengaruh variabel kompetisi politik, ukuran pemda, rasio kemandirian finansial, pendapatan per kapita dan opini terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Untuk menguji signifikansi koefisien setiap variabel bebas yang digunakan *p-value* (*probability value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) yang artinya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan. Hasil uji hipotesis dengan PLUM dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4
Uji Hipotesis

	Estimate	Wald	Df	Sig.
[KETERSEDIAAN = ,00]	1,723	5,476	1	0,019
[KETERSEDIAAN = 1,00]	4,186	21,222	1	0,000
POLCOMP	0,062	0,198	1	0,656
SIZE	1,552×10 ⁻¹⁴	0,100	1	0,751
INDEP	-2,074	0,565	1	0,452
INCOME	1,272×10 ⁻⁸	6,188	1	0,013
OPINI	1,149	5,771	1	0,016

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Pembahasan Hasil Penelitian Model I

Hubungan Kompetisi Politik dengan Ketersediaan IFR oleh Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis 1a penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian ini tidak mendukung pernyataan Baber dan Sen (1984) yang berpendapat bahwa kompetisi politik sebagai alat yang dapat digunakan oleh rival politik untuk menyerang pemerintah yang berkuasa atas praktik manajemen yang tidak bertanggung jawab dan oleh sebab itu dapat mendorong pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan yang telah dibuat sebagai komitmen dalam mewujudkan manajemen yang efisien melalui pelaporan yang tepat. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laswad (2005) yang tidak menemukan adanya hubungan positif antara kompetisi politik dengan ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Asimetri informasi merupakan salah satu permasalahan utama dalam hubungan agen-prinsipal. Dengan adanya kompetisi politik yang tinggi, diharapkan pemerintah sebagai pihak yang unggul dalam kepemilikan informasi mendapat pengawasan yang tinggi oleh saingan politiknya. Lebih lanjut pengawasan politik yang tinggi akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Namun sesuai dengan hasil penelitian bahwa kompetisi politik tidak memiliki pengaruh terhadap intensi pemerintah dalam menyediakan informasi keuangannya melalui internet sebagai media *cost effective*. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak pejabat incumbent ataupun kandidat lainnya lebih memilih untuk menggunakan intervensi dan negosiasi politik terhadap lawan politiknya. Hal ini berpengaruh terhadap dorongan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan.

Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan IFR oleh Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis 2a penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan pernyataan Ettredge et al., (2002) dan Pirchegger and Wagenhofer (1999) yang menyatakan Internet merupakan media yang efisien dan memuaskan yang dapat digunakan oleh pemerintah yang memiliki ukuran yang besar dalam menyampaikan laporan keuangannya secara sukarela dibandingkan dengan cara tradisional dengan mengkopi laporan keuangan yang banyak, oleh sebab itu biaya yang digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan di internet sangat tergantung dari ukuran suatu pemerintahan. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad (2005) yang tidak menemukan adanya hubungan yang positif antara ukuran pemerintah daerah dengan ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian, jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap dorongan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangannya. Aset pemerintah merupakan infrastruktur yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian seharusnya semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah dapat dipastikan semakin banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk pada daerah tersebut. Namun tidak jarang kita menemukan pemda yang memiliki jumlah aset yang besar dengan jumlah penduduk yang sedikit apabila dibandingkan dengan pemda lain yang memiliki aset yang sedikit dengan jumlah penduduk yang besar. Dalam hal ini, besarnya ukuran pemerintah daerah tidak secara langsung mempengaruhi dorongan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangannya di internet.

Hubungan Rasio Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan IFR oleh Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis 3a penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan finansial daerahnya masih tinggi. Hampir sebagian besar sumber dana pemerintah daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU). Tidak jarang kita jumpai daerah yang memiliki pendapatan asli daerah jauh lebih kecil dibanding total DAU yang diterima. Robbins dan Austin (1986) menemukan adanya hubungan yang

signifikan antara ketergantungan pemda terhadap bantuan dari pemerintahan yang lainnya dengan pengungkapan informasi keuangan oleh pemda. Dengan demikian berdasarkan temuan tersebut pendapatan asli daerah yang tinggi tidak menjadi jaminan bahwa pemda akan terdorong untuk lebih transparan dan akuntabel.

Hubungan Pendapatan per kapita masyarakat dengan Ketersediaan IFR oleh Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis 4a penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad (2005) yang menemukan adanya hubungan yang positif antara kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan pendapatan per kapita terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan berdampak pada masyarakat yang lebih produktif dan memiliki kebutuhan yang tinggi akan informasi, sehingga pemerintah terdorong untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat dengan menyediakan informasi keuangannya melalui media internet.

Hubungan Opini Audit dengan Ketersediaan IFR oleh Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis 5a penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit yang dimiliki oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan pernyataan Styles dan Tennyson (2007) yang mengungkapkan bahwa pemda yang mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik, cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya di internet.

Model II Keteraksesan IFR

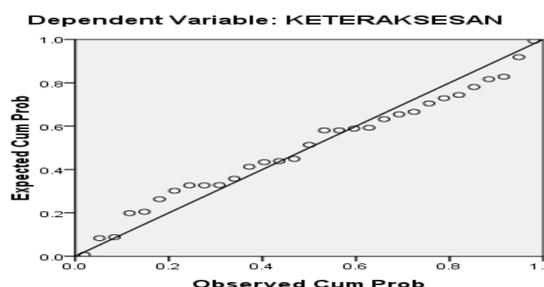
Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan terhadap data residual model regresi. Grafik *normal probability plots* pada gambar 2 menunjukkan titik-titik observasi menyebar dan mendekati garis diagonal. Hal ini berarti nilai residual telah terdistribusi dengan normal.

Gambar 2
Grafik P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2015

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan semua nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari masalah multikolinieritas dan data layak digunakan dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*, dan uji statistik *gletjer*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk pola yang jelas, serta menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji *Glejser* menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu nilai absolut residualnya. Nilai signifikasi variabel independen jauh di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Hasil uji signifikasi parameter individual (uji t) menginformasikan bahwa hanya variabel Rasio Kemandirian (INDEP) yang menunjukkan pengaruh signifikan pada 0,05 atau pada level 5%. Hasil uji dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 5
Uji T Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	0,441	0,086		5,149	0,000
POLCOMP	-0,005	0,016	-0,054	-0,328	0,746
SIZE	$-1,420 \times 10^{-15}$	0,000	-0,057	-0,235	0,816
INDEP	0,926	0,414	0,618	2,237	0,034
INCOME	$-1,815 \times 10^{-10}$	0,000	-0,090	-0,465	0,646
OPINI	0,034	0,052	0,117	0,658	0,516

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Pembahasan Hasil Penelitian Model II

Hasil pengujian hipotesis model II penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemda, pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR oleh pemerintah daerah. Sedangkan rasio kemandirian finansial pemda (INDEP) berpengaruh positif terhadap keteraksesan IFR.

Adanya kompetisi politik seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan penyampaian informasi kepada masyarakat Sistem pemilihan yang ada di Indonesia menjadi salah satu alasan tidak adanya pengaruh kompetisi politik yang tinggi terhadap dorongan pemerintah dalam memudahkan akses informasi keuangannya kepada masyarakat. Pada banyak kasus, kepala daerah yang terpilih merupakan kandidat yang diusung oleh partai politik yang dominan. Dengan demikian, kandidat yang diusung oleh partai dominan dan terpilih sebagai kepala daerah tidak terlalu mengkhawatirkan serangan politik pasca pemilihan kepala daerah.

Untuk mengurangi kompleksitas dalam pemenuhan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan website yang dimiliki untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan yang dimilikinya. Namun hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki bukan merupakan faktor yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi keuangannya.

Pemda yang memiliki pendapatan yang tinggi menunjukkan kinerja yang positif dalam memaksimalkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dijadikan indikator prestasi yang dicapai oleh pemda tersebut. Berdasarkan teori *signalling*, pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah

dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada website pemerintah sebagai media alternatif yang efisien. Keteraksesan informasi keuangan adalah salah satu aspek dari pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemda. Keteraksesan informasi keuangan merupakan bentuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan pemda yang tersedia pada website. Faktor seperti teknologi jaringan dan tenaga ahli dibutuhkan untuk desain website dan akses website yang mudah. Faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat keteraksesan informasi keuangan pada website pemerintah. Sekalipun pemerintah mempunyai dorongan yang kuat untuk menyediakan informasi keuangannya sebagai bentuk tekanan dari masyarakat untuk memperoleh informasi, namun apabila tidak didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai, maka kemudahan akses yang diberikan tidak akan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengujian model I yang menggunakan metode regresi logistik ordinal bahwa pendapatan per kapita dan opini memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah dan kemandirian finansial pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dorongan untuk memperoleh informasi atas pengelolaan sumber-sumber daya oleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. Adanya kebutuhan masyarakat tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan informasi dan sekaligus menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya dan kinerja yang telah dicapai. Penghargaan atas pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk prestasi pemerintah di bidang keuangan. Berdasarkan teori *signalling*, pemerintah yang memiliki kinerja dan prestasi yang baik akan berusaha untuk memberikan sinyal yang positif kepada masyarakat. Opini audit merupakan salah satu bentuk prestasi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga pemda yang memiliki opini audit yang baik memiliki kecenderungan untuk menyediakan informasi keuangannya pada website.

Pengujian model II dengan menggunakan metode regresi berganda menunjukkan bahwa kemandirian finansial pemda memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah. Pemerintah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja yang positif dalam memaksimalkan potensi daerahnya. Salah satu upaya pemerintah menunjukkan sinyal positif dalam memaksimalkan potensi daerahnya adalah dengan cara memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi keuangan pada websitenya. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi keuangannya adalah dengan mendesain website sebaik dan seoptimal mungkin.

REFERENSI

- Banker, R.D., Patton, J.M., 1987. *Analytical agency theory and municipal accounting: An introduction and an application*. Research in Governmental and Nonprofit Accounting 3 (Part B), 29–50.
- Christiaens, J., 1999. *Financial accounting reform in Flemish municipalities: An empirical investigation*. Financial Accountability and Management 15 (1), 21–40.
- Giroux, G., & Shields, D. (1993). "Accounting Controls and Bureaucratic Strategies in Municipal Government." Journal of Accounting and Public Policy, 22: 203-230
- Giroux, G., & Deis, D. (1993). "Investor Interests and Government Accounting Disclosure." Accounting, Auditing & Accountability Journal, 6 (1):63-78

- Ingram, R.W., DeJong, D.V., 1987. *The effect of regulation on Local Government Disclosure Practices*. *Journal of Accounting and Public Policy* 6 (4), 245–270.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. *Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed*. *European Journal of Political Research* 37: 291-307
- Laswad, Fawzi dkk. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24; 101–121.
- Muhammad, Bagus H. P. 2012. *Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia*.
- Pina, V. Torres, L. Dan Royo, S. 2010. *Is E-Government Promoting Convergence Towards More Accountable Local Government?* *International Public Management Journal* 13 (4):350-380.
- Puspita, Rora & Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September 2012.
- Ryan, Christine., Trevor, Stanley., dan Morton, Nelson. 2002. *Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999*. *Financial Accountability & Management*, Vol. 18 (3).
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: An Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002. <http://www.cergas.info>
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). *The Accesibility of Financial Reporting U.S Municipalities on The Internet*. *Journal Of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Zimmerman, Jerold L. (1977). *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Politiccal Incentives*. *Journal Accounting Research*. Vol. 15, 107-144